

## **ANALISIS PROFIL KOMPETENSI LULUSAN IAIN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM ERA ORDE BARU (1990–2000)**

**Muhammad Azmi Auf<sup>1\*</sup>, Ahmad Arifi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: mhdazmiauf01@gmail.com<sup>1</sup> ahmad.arifi@uin-suka.ac.id<sup>2</sup>

---

### **Article Info**

#### *Article history:*

Received 10 19, 2025

Revised 01 22, 2026

Accepted 02 01, 2026

#### **Keywords:**

IAIN

Islamic higher education

New Order

Reform Era

Education politics

---

### **ABSTRACT**

This study analyzes how state policy shaped the competency profile expected of IAIN (State Islamic Institutes) graduates in Indonesia during the late New Order and the early Reform transition (1990–2000). It begins from the tension between a state-developmental perspective that positioned IAIN as an instrument for political stability and national development and a critical educational perspective that treats education as a space for liberation and the growth of social consciousness. Using a qualitative interpretive-critical design, the study applies Paulo Freire's notion of critical consciousness and Antonio Gramsci's concept of hegemony to analyze policy documents, curricula, and institutional archives. The analysis shows that throughout the 1990 IAIN was steered to produce graduates who were bureaucratically oriented, politically compliant, and institutionally moderate, enabling ideological reproduction under state supervision. In the crisis years and early Reform period, however, pressures for democratization and academic openness supported a reorientation toward greater academic autonomy and intellectual professionalism. This shift marked an early move from state-defined loyalty toward competencies aligned with scholarly development and public engagement. Future research could extend the period beyond 2000 and compare multiple IAIN/UIN campuses to map regional variations and longer-term policy effects.

---

#### *\*Corresponding Author:*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mhdazmiauf01@gmail.com

---

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan pendidikan Islam pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat nilai keagamaan dalam sistem pendidikan nasional serta membentuk moral peserta didik. Namun, dalam konteks era Orde Baru (1990–2000), fungsi tersebut bergeser menjadi instrumen politik dan ekonomi untuk menopang stabilitas nasional (Nazifa et al., 2025). Pendidikan Islam, termasuk lembaga pendidikan tinggi Islam seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN), diarahkan bukan semata untuk melahirkan insan intelektual yang merdeka dan kritis, melainkan untuk mencetak tenaga kerja yang patuh dan birokrat yang loyal terhadap negara (Nasir & Sunardi, 2025). Fenomena ini tercermin dalam kurikulum dan orientasi lulusan yang menekankan disiplin, keteraturan, serta kepatuhan terhadap ideologi pembangunan (Zulkifli & Muhammad, 2023). Azra (2012) mencatat bahwa pendidikan Islam pada masa itu diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, sementara Tilaar (2002) menilai kebijakan tersebut bersifat sentralistik dan hegemonik (Adibah, 2020). Sejalan dengan itu, Freire (2020) menyebut pendidikan yang kehilangan kesadaran kritis sebagai bentuk *domesticated education* pendidikan penjinakan yang menumpulkan daya berpikir peserta didik (Sudrajat, 2021).

Oleh karena itu, arah lulusan IAIN pada masa Orde Baru perlu dipahami tidak hanya sebagai hasil dari sistem kurikulum, tetapi juga sebagai produk dari kontrol ideologi negara dan rekayasa kesadaran sosial yang terintegrasi dalam kebijakan pendidikan nasional.

Kajian-kajian tentang politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan beberapa kecenderungan utama dalam memotret arah dan dampak kebijakan negara terhadap lembaga pendidikan Islam. Pertama, sebagian besar penelitian menempatkan pendidikan Islam dalam kerangka relasi negara, pendidikan dan proses integrasinya ke sistem pendidikan nasional. Dalam kecenderungan ini, studi-studi menyoroti bagaimana regulasi negara membentuk posisi pendidikan Islam, baik sebagai penopang moral kebangsaan pada periode awal kemerdekaan maupun sebagai bagian dari arsitektur pendidikan nasional yang lebih luas (Fadli & Kumalasari, 2019). Kedua, penelitian lain cenderung fokus pada kebijakan kelembagaan dan standardisasi, terutama terkait integrasi madrasah dan IAIN melalui perangkat kebijakan seperti SKB Tiga Menteri dan konsekuensinya terhadap tata kelola, kurikulum, serta orientasi pendidikan Islam agar selaras dengan agenda pembangunan dan stabilitas politik (Effendi, 2021). Ketiga, sejumlah kajian menekankan dimensi pengendalian ideologi keagamaan melalui penguatan pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan tinggi, yang dipahami sebagai strategi negara dalam mengelola wacana keagamaan di tengah meningkatnya kesadaran Islam pada fase akhir Orde Baru (M. Fazlurrahman, 2017).

Meskipun tiga kecenderungan tersebut telah memperkaya pemahaman tentang dinamika politik pendidikan Islam, ruang kajian masih terbuka pada aspek yang lebih spesifik, yakni profil kompetensi lulusan IAIN sebagai "output" kebijakan pendidikan Islam. Sejauh penelusuran awal, belum banyak studi yang secara khusus menelaah bagaimana kebijakan negara pada 1990–2000 membentuk profil kompetensi lulusan IAIN, terutama jika dibaca melalui kerangka politik pendidikan dan proses pembentukan kesadaran sosial. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis orientasi kompetensi lulusan IAIN pada akhir Orde Baru hingga awal Reformasi sebagai cermin dialektika antara kekuasaan, institusi pendidikan Islam, dan transformasi kesadaran sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai profil kompetensi lulusan IAIN dalam kerangka politik kebijakan negara pada akhir era Orde Baru hingga awal transisi Reformasi (1990–2000). Secara spesifik, penelitian ini memiliki tiga tujuan: (1) mendeskripsikan bagaimana kebijakan pendidikan nasional pada masa Orde Baru mengarahkan profil kompetensi lulusan IAIN; (2) menganalisis secara kritis faktor-faktor politik-kelembagaan yang merepresentasikan lulusan IAIN sebagai aparatur pembangunan dan birokrat yang loyal terhadap negara; serta (3) menjelaskan implikasi representasi tersebut terhadap pembentukan kesadaran sosial-ideologis mahasiswa dan orientasi pendidikan Islam menjelang Reformasi (Nazifa et al., 2025). Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kebijakan negara pada masa Orde Baru membentuk arah profil kompetensi lulusan IAIN; (2) faktor-faktor apa yang mendorong representasi lulusan IAIN sebagai aparatur pembangunan dan birokrat loyal; dan (3) bagaimana implikasi representasi itu terhadap pembentukan kesadaran sosial-ideologis mahasiswa serta orientasi pendidikan Islam pada masa transisi menuju Reformasi.

Kajian tentang arah lulusan IAIN pada masa Orde Baru (1990–2000) penting dilakukan karena dapat membantu memahami bagaimana kebijakan pendidikan tinggi Islam digunakan untuk membentuk tipe lulusan tertentu sesuai kebutuhan negara. Pada masa itu, lulusan yang patuh, disiplin, dan loyal terhadap pemerintah dianggap sebagai

indikator keberhasilan pendidikan. Namun, pandangan semacam ini sekaligus mencerminkan adanya upaya penyeragaman cara berpikir dan berperilaku melalui mekanisme pendidikan tinggi Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan negeri, IAIN memainkan peran strategis dalam mencetak lulusan yang diharapkan mampu mendukung birokrasi pembangunan dan menjaga stabilitas ideologi negara. Akibatnya, orientasi keilmuan dan sosial IAIN bergeser: dari fungsi pembebasan menuju fungsi pelestarian tatanan. Dalam konteks ini, arah lulusan IAIN dapat dibaca sebagai bentuk pengendalian budaya dan kesadaran, di mana mahasiswa dibentuk agar menerima tatanan sosial yang ada tanpa banyak bertanya. Pemikiran ini masih bersifat sementara dan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya melalui analisis data sejarah serta teori politik pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis dan corak interpretif-kritis, karena sesuai untuk menjelaskan makna di balik kebijakan pendidikan serta konstruksi profil kompetensi lulusan pendidikan tinggi Islam pada era Orde Baru. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah, antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, SKB Tiga Menteri 1975, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta arsip kebijakan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan dengan pengelolaan pendidikan Islam dan perguruan tinggi keagamaan. Data sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas politik pendidikan, ideologi pembangunan, serta dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui pembacaan tematik dan kritis terhadap dokumen dengan menggunakan kerangka kesadaran kritis Paulo Freire dan konsep hegemoni Antonio Gramsci untuk menelusuri relasi antara kebijakan, kuasa, dan arah kompetensi lulusan.

Pemilihan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu memilih dokumen dan literatur secara sengaja berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi untuk menjawab fokus penelitian mengenai profil kompetensi lulusan IAIN, kebijakan pendidikan, dan ideologi pembangunan pada era Orde Baru. Kriteria pemilihan sumber meliputi keaslian dokumen, keterkaitan dengan konteks sejarah 1990–2000, serta kredibilitas lembaga penerbit. Karena itu, penelitian ini memprioritaskan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, arsip kebijakan dan dokumen kelembagaan yang diterbitkan oleh instansi negara (terutama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta literatur akademik yang otoritatif dalam kajian pendidikan Islam dan politik pendidikan di Indonesia, termasuk karya-karya pemikir seperti Azyumardi Azra, M. Dawam Rahardjo, dan H.A.R. Tilaar.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah sumber primer dan sekunder berupa undang-undang, kebijakan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis dokumen untuk menelusuri dinamika perubahan kebijakan dan arah pendidikan tinggi Islam, terutama pada aspek kurikulum, profil kompetensi lulusan, dan relasi ideologi pembangunan dalam rentang 1990–2000. Data pendukung juga diperoleh melalui dokumentasi terhadap arsip, laporan pemerintah, berita, serta sumber relevan lainnya yang dapat memperkaya konteks dan memperkuat interpretasi temuan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengorganisasian dan penafsiran data secara bertahap. Pertama, data dari dokumen kebijakan, kurikulum, dan arsip kelembagaan dikurasi dengan cara menyeleksi bagian-

bagian yang paling relevan dengan fokus penelitian, seperti arah kebijakan negara, narasi ideologi pembangunan, dan konstruksi profil kompetensi lulusan IAIN. Selanjutnya, data yang telah terseleksi dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis, kemudian disusun dalam narasi tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antara kebijakan, mekanisme kuasa, dan arah kompetensi lulusan. Tahap berikutnya, peneliti melakukan interpretasi dan penarikan simpulan dengan memeriksa konsistensi temuan antar-sumber serta mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori kesadaran kritis Paulo Freire dan konsep hegemoni Antonio Gramsci untuk membaca dimensi ideologis di balik kebijakan pendidikan Islam serta bagaimana kebijakan tersebut membentuk profil kompetensi lulusan IAIN pada periode 1990–2000.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### **1. Profil Kompetensi Lulusan IAIN dalam Kebijakan Pendidikan Islam pada Puncak Pemerintahan Soeharto (1990–1998)**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode puncak kekuasaan Soeharto (1990–1998), profil kompetensi lulusan IAIN dibentuk kuat oleh paradigma pembangunan dan stabilitas politik nasional. Berdasarkan telaah terhadap GBHN 1993 serta kebijakan integratif seperti SKB Tiga Menteri 1975, negara menempatkan pendidikan Islam termasuk IAIN sebagai bagian dari strategi pembentukan “manusia Indonesia seutuhnya” yang selaras dengan agenda pembangunan (Alfarisi & Bakar, 2022). Orientasi tersebut tampak pada arahan kurikulum yang menekankan internalisasi nilai Pancasila, kedisiplinan, kepatuhan sosial, serta loyalitas terhadap tatanan politik negara. Dalam kerangka ini, profil kompetensi lulusan IAIN tidak terutama diarahkan untuk melahirkan inovasi sosial atau kritik struktural, melainkan untuk menghasilkan lulusan yang religius sekaligus kompatibel dengan tertib sosial-politik Orde Baru.

Kebijakan tersebut berjalan dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan birokratis. Lembaga pendidikan, termasuk IAIN, didorong mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan pusat sehingga nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dengan ideologi pembangunan agar sejalan dengan agenda stabilitas (Chairul Huda, 2018). Dokumen-dokumen pendidikan seperti pedoman PAI dan kurikulum perguruan tinggi pada pertengahan 1990-an menegaskan moralitas publik yang terhubung dengan etika Pancasila sebagai indikator keberhasilan Pendidikan (Arifin, 2021). Dengan demikian, profil kompetensi lulusan IAIN pada periode ini cenderung bercorak birokratis, moderat, dan ideologis-kompatibel: religius dalam ekspresi, namun tetap bergerak dalam batas-batas kepatuhan pada otoritas negara.

#### **2. Mekanisme Politik Kelembagaan yang Merepresentasikan Lulusan IAIN sebagai Aparatur Pembangunan dan Birokrat Loyal**

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa representasi lulusan IAIN sebagai aparatur pembangunan dan birokrat loyal tidak terjadi secara alamiah, melainkan dibentuk melalui mekanisme politik-kelembagaan yang bekerja di tingkat regulasi, kurikulum, dan tata kelola. Dalam konteks Orde Baru, pendidikan tinggi Islam diposisikan sebagai bagian dari proyek ideologis negara: stabilitas dan pembangunan ekonomi menjadi horizon utama, sehingga pendidikan diarahkan untuk menguatkan

legitimasi kekuasaan dan ketertiban sosial. Kerangka ini menjelaskan mengapa standardisasi kurikulum, kontrol administrasi, dan penyeragaman orientasi kelembagaan menjadi instrumen yang dominan.

Dengan menggunakan pisau analisis hegemoni (Gramsci), temuan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berperan sebagai mekanisme yang menormalisasi nilai dan orientasi tertentu sebagai "kewajaran" sosial, sehingga keterikatan pada agenda negara diproduksi melalui konsensus yang dibangun lewat institusi pendidikan. Sementara melalui konsep kesadaran kritis (Freire), terlihat bahwa pembelajaran cenderung diarahkan pada pembentukan kepatuhan dan reproduksi nilai dominan, bukan pada praksis reflektif yang mendorong pembacaan kritis terhadap struktur sosial-politik. Dengan demikian, kebijakan Orde Baru membentuk profil kompetensi lulusan IAIN yang kompatibel dengan kebutuhan birokrasi dan stabilitas: lulusan dipersiapkan menjadi pelaksana administrasi, penjaga moderasi, dan perpanjangan tangan proyek pembangunan negara bukan aktor yang menantang relasi kuasa secara terbuka.

### **3. Implikasi terhadap Kesadaran Sosial-Ideologis Mahasiswa IAIN pada Masa Krisis dan Transisi Reformasi (1997-2000)**

Pada masa krisis dan transisi Reformasi (1997-2000), temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran penting yang memengaruhi kesadaran sosial-ideologis mahasiswa dan lulusan IAIN. Krisis ekonomi dan guncangan politik membuka ruang evaluasi terhadap relevansi orientasi pendidikan sebelumnya. Lulusan IAIN menghadapi ketidakpastian sosial-ekonomi dan kompetisi kerja, sehingga muncul tuntutan agar kompetensi lulusan tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi bergerak ke arah kapasitas adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 juga mengubah relasi antara pendidikan Islam dan negara: dari sebelumnya sebagai instrumen kontrol yang kuat, bergerak menuju ruang yang lebih terbuka terhadap pembaruan. Dalam konteks ini, muncul benih pergeseran orientasi dari "loyalitas ideologis" menuju "profesionalisme intelektual" dan upaya memperluas fungsi sosial pendidikan Islam. Pergeseran tersebut menandai transformasi awal bahwa keberhasilan pendidikan tinggi Islam mulai dibaca bukan semata dari keselarasan terhadap otoritas politik, melainkan dari kemampuan lulusan untuk berperan aktif dalam masyarakat yang berubah baik melalui penguatan kapasitas akademik, keterlibatan sosial, maupun pembacaan kritis terhadap realitas pascakrisis.

Dengan demikian, masa ini menjadi jembatan penting bagi integrasi pendidikan tinggi Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih otonom, terbuka, dan kontekstual.

**Tabel 1. Sintesis Analitis Arah Lulusan IAIN Era Orde Baru (1990-2000)**

Aspek	1990-1998 (Puncak Orde Baru)	1997-2000 (Transisi Reformasi)	1999-2000 (Awal Reorientasi IAIN)
-------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

<b>Konteks Politik</b>	Sentralistik, hegemonik, kontrol ideologi negara	Krisis ekonomi-politik, kejatuhan Soeharto	Reformasi dan desentralisasi pendidikan
<b>Orientasi Pendidikan</b>	Birokratis dan ideologis	Mulai reflektif dan kritis	Akademik, profesional, dan integratif
<b>Karakter Lulusan</b>	Loyal, moderat, patuh pada negara	Reflektif, kritis, mencari relevansi sosial	Intelektual-profesional, adaptif
<b>Peran Sosial</b>	Aparatur negara, guru, penyuluh agama	Aktivis sosial, penggerak wacana kritis	Peneliti, akademisi, pembaru pendidikan
<b>Ideologi Dominan</b>	Pembangunanisme dan stabilitas	Pembebasan dan kesadaran sosial	Moderasi dan integrasi keilmuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arah lulusan IAIN pada era Orde Baru (1990–2000) mengalami perjalanan dialektik, dari birokratisasi dan domestikasi kesadaran menuju pembebasan dan reorientasi intelektual.

Arah lulusan pada masa awal Orde Baru mencerminkan proyek ideologis negara, namun pada akhir dekade 1990-an muncul kesadaran baru yang menandai lahirnya generasi intelektual Muslim kritis dan profesional. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Islam tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga arena perjuangan ideologis dalam membentuk kesadaran sosial umat Islam Indonesia.

Sebagai catatan lanjutan, dinamika setelah tahun 2000 memperlihatkan arah penguatan kelembagaan dan pembaruan keilmuan pendidikan tinggi Islam yang semakin tampak dalam agenda otonomi, profesionalisasi, serta perluasan mandat akademik. Namun, bagian ini berada di luar batas utama penelitian (1990–2000) dan dapat menjadi pijakan untuk riset berikutnya yang menelusuri keberlanjutan perubahan orientasi lulusan IAIN/UIN pada periode pasca-2000.

## PEMBAHASAN

Fokus periode 1990–2000 dalam penelitian ini bukan sekadar pilihan kronologis, melainkan strategi analitis untuk menangkap fase paling menentukan ketika relasi negara-pendidikan Islam mencapai bentuk yang relatif matang (akhir Orde Baru) lalu mengalami guncangan besar (krisis dan transisi Reformasi). Periode ini berfungsi sebagai “titik balik” untuk membaca bagaimana profil kompetensi lulusan IAIN dibentuk, dipertahankan, dan mulai dinegosiasikan ulang ketika struktur kekuasaan berubah. Dengan kata lain, memahami 1990–2000 membantu menjelaskan akar historis dari pola orientasi lulusan yang jejaknya masih dapat dilihat dalam dinamika pendidikan tinggi Islam pada dekade-dekade setelahnya, termasuk 10 tahun terakhir.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa profil kompetensi lulusan IAIN bergerak dalam tiga fase yang saling terkait: fase stabilisasi ideologis dan pembangunan (1990–1998), fase krisis dan transisi (1997–2000), serta fase awal pembukaan ruang pembaruan pasca-1998. Pola ini menegaskan bahwa arah kompetensi lulusan tidak pernah netral; ia merupakan produk dari interaksi antara struktur politik, kebutuhan ekonomi, dan strategi ideologis negara yang berubah dari waktu ke waktu. Pada puncak Orde Baru, orientasi kompetensi yang menonjol adalah kepatuhan, keteraturan sosial, dan kompatibilitas birokratis; sementara pada masa krisis dan transisi, muncul tekanan baru yang mendorong penyesuaian, terutama terkait relevansi sosial dan profesional. (Siswati, 2021; Sudrajat, 2021)

Temuan tersebut dapat dibaca lebih tajam melalui teori kesadaran kritis Paulo Freire. Dalam kerangka Freire, pendidikan dapat bergerak dari pola “penjinakan” menuju pola pembebasan, tergantung apakah proses belajar mendorong kritis-reflektif atau sekadar adaptif-patuhan (Sudrajat, 2021). Freire juga membedakan corak kesadaran dari kesadaran yang cenderung menerima realitas apa adanya menuju kesadaran kritis yang menghubungkan pengalaman individu dengan struktur sosial-politik. Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, fase 1990–1998 memperlihatkan kecenderungan dominan pada model reproduktif: pembentukan kompetensi lulusan lebih diarahkan pada internalisasi nilai yang dianggap mapan (tertib sosial, moralitas publik, dan loyalitas), sehingga ruang praksis kritis yakni refleksi dan tindakan untuk mengubah realitas menjadi terbatas. Dalam bahasa Freire, orientasi ini lebih dekat pada pendidikan yang membentuk “kepatuhan fungsional”, bukan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis sebagai kemampuan membaca dunia secara reflektif dan transformatif.

Namun, krisis 1997–1998 dan transisi Reformasi menghadirkan kondisi yang mendorong pergeseran kesadaran. Guncangan ekonomi dan ketidakpastian sosial memaksa lulusan dan institusi pendidikan untuk menilai ulang relevansi kompetensi yang sebelumnya dibentuk dalam kerangka stabilitas. Di sinilah aspek “kritis” dalam kerangka Freire menjadi penting: perubahan struktur politik dapat mempercepat munculnya pertanyaan-pertanyaan baru tentang tujuan belajar, fungsi institusi, dan keterhubungan pengetahuan dengan realitas sosial. Temuan tentang mulai menguatnya tuntutan relevansi sosial-profesional dan ruang otonomi akademik dapat dipahami sebagai awal pergeseran dari orientasi kepatuhan menuju orientasi yang lebih reflektif, meski pergeseran itu tidak selalu linier dan sering berhadapan dengan residu pola lama (IKAPI, 1998; Khairunnisa et al., 2023).

Dari sudut pandang hegemoni Antonio Gramsci, perubahan orientasi kompetensi lulusan juga dapat dibaca sebagai dinamika antara coercion (pengendalian melalui struktur) dan consent (persetujuan sosial melalui normalisasi nilai) yang bekerja melalui institusi Pendidikan (Siswati, 2021). Pada Orde Baru, kebijakan pendidikan dan perangkat ideologis seperti narasi pembangunan dan stabilitas menghasilkan “kesepakatan” sosial yang menempatkan kepatuhan sebagai kebijakan publik. Pendidikan Islam termasuk IAIN dapat berfungsi sebagai medium untuk membangun persetujuan tersebut dengan menanamkan nilai moderasi yang kompatibel dengan agenda negara dan kebutuhan administrative (Barizi, 2011; IKAPI, 1998). Dalam kerangka ini, profil kompetensi lulusan IAIN bukan hanya hasil kurikulum, tetapi juga hasil dari proses hegemonik: nilai, bahasa, dan standar “lulusan ideal” diproduksi dan diulang sehingga tampak wajar dan tak terbantahkan.

Kombinasi Freire-Gramsci membantu menjelaskan mengapa perubahan pada masa krisis dan Reformasi tidak otomatis melahirkan orientasi lulusan yang sepenuhnya kritis. Dalam logika hegemoni, runtuhnya rezim tidak serta-merta menghapus mekanisme persetujuan sosial yang telah lama bekerja; sementara dalam logika Freire, perubahan kesadaran memerlukan praksis pendidikan yang konsisten (dialogis, problem-posing, reflektif), bukan sekadar pergantian kebijakan. Karena itu, temuan tentang pergeseran menuju profesionalisme dan otonomi akademik perlu dipahami sebagai awal negosiasi: institusi mulai membuka ruang pembaruan, tetapi jejak orientasi birokratis dan logika stabilitas bisa tetap bertahan sebagai habitus kelembagaan.

Temuan penelitian ini juga dapat diposisikan terhadap kajian terdahulu. Steenbrink (1986) menggarisbawahi pendidikan Islam sebagai bagian dari proses modernisasi; Tilaar (1994) menekankan kuatnya karakter sentralistik sistem pendidikan; Azra (1999) menunjukkan keterkaitan kurikulum pendidikan Islam dengan agenda pembangunan;

sedangkan Rahardjo (2001) menyoroti relasi pendidikan dan mobilitas sosial. Penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menempatkan profil kompetensi lulusan IAIN sebagai indikator kunci politik pendidikan: bukan hanya “apa kebijakannya”, tetapi “kompetensi apa yang diproduksi kebijakan” dan “kesadaran sosial seperti apa yang dimungkinkan atau dibatasi” oleh desain kebijakan tersebut.

Lalu, bagaimana kaitannya dengan 10 tahun terakhir? Secara konseptual, dekade terakhir memperlihatkan bahwa lulusan pendidikan tinggi Islam – termasuk jaringan institusi yang bertransformasi dari IAIN ke bentuk yang lebih luas – menghadapi tuntutan yang semakin kompleks: kompetensi profesional, literasi digital, kepekaan sosial, dan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat plural. Dalam konteks ini, warisan orientasi masa Orde Baru dapat muncul sebagai dua kecenderungan yang bertemu: di satu sisi, masih ada tekanan untuk memenuhi logika administratif dan standar formal (yang bisa melanjutkan orientasi birokratis); di sisi lain, terbuka peluang lebih besar bagi lahirnya lulusan yang adaptif dan memiliki kepedulian sosial melalui iklim demokratis, ruang publik digital, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, analisis 1990–2000 tetap relevan bukan karena ingin “mengulang masa lalu”, tetapi karena membantu membaca akar pola yang bisa bertahan (continuity) sekaligus titik-titik perubahan (discontinuity) yang menentukan arah lulusan pada masa kini.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengajukan proposisi bahwa profil kompetensi lulusan IAIN pada 1990–2000 dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan negara, bukan semata oleh kebutuhan akademik internal. Pada fase akhir Orde Baru, kebijakan pendidikan beroperasi sebagai perangkat normalisasi yang mendorong kompetensi lulusan cenderung administratif-birokratis, moderat, dan kompatibel dengan agenda stabilitas; sementara pada masa krisis dan transisi Reformasi, guncangan politik-ekonomi membuka ruang negosiasi yang memicu pergeseran ke arah profesionalisme akademik dan munculnya refleksi sosial yang lebih kritis. Dengan demikian, orientasi lulusan dapat dipahami sebagai indikator bagaimana pendidikan tinggi Islam bergerak antara reproduksi ideologi dan peluang pembentukan kesadaran ketika struktur politik berubah.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kerangka kesadaran kritis Paulo Freire dan hegemoni Antonio Gramsci relevan untuk membaca pendidikan tinggi Islam sebagai arena relasi kuasa: kebijakan bukan hanya aturan administratif, tetapi juga mekanisme yang membentuk cara berpikir dan arah kompetensi lulusan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi data dokumen dan ketiadaan data pengalaman alumni, sehingga riset berikutnya perlu memperkuat bukti melalui pendekatan historis-sosiologis (misalnya wawancara alumni lintas wilayah) serta memperpanjang rentang kajian pasca-2000 untuk menilai keberlanjutan perubahan profil lulusan hingga konteks kontemporer, termasuk dampak digitalisasi dan dinamika sosial-politik terbaru.

## REFERENSI

- Adibah, I. Z. (2020). Dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru (1966–1998). *Jurnal Inspirasi*, 4(2), 110–126.
- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). SKB 3 Menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.286>
- Arifin, S. (2021). Konsep Pelajar Pancasila dalam perspektif pendidikan Islam dan implikasinya terhadap penguatan karakter religius di era milenial (Vol. 4, Issue 1). UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Logos Wacana Ilmu.
- Barizi, A. (2011). Pendidikan integratif: Akar tradisi & integrasi keilmuan pendidikan Islam (A. H. Fathani (Ed.)). UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Chairul Huda, M. (2018). Meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bernegara: Implementasi nilai-nilai keseimbangan dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 1(1), 1–22.
- Effendi, R. (2021). Studi Islam Indonesia: Pendidikan Islam modern (kajian historis perspektif Karel A. Steenbrink). Alhamra: Jurnal Studi Islam, 2(1), 36–48.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama (periode 1945–1966). Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 9(2), 157–171. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>
- Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.; M. B. Ramos, Trans.; D. Macedo, Intro.). Continuum.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Khairunnisa, E., Maisyaroh, D., & Putri, K. T. (2023). Analisis kebijakan moneter terhadap krisis moneter 1997–1998 di Indonesia. JEI: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.317>
- M. Fazlurrahman, H. (2017). Politik pendidikan Islam. Dalam M. A. Prof. Dr. Abd. Haris (Ed.), Imtiyaz, Politik Pendidikan Islam (Vol. 8, Issue 1). IMTIYAZ.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1993). GBHN: Garis-garis besar haluan negara 1993–1998 (Tap MPR No. II/MPR/1993). Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1998–2003: Tap MPR No. II/MPR/1998. Sinar Grafika Offset.
- Nasir, M., & Sunardi, S. (2025). Reorientasi pendidikan Islam dalam era digital: Telaah teoritis dan studi literatur. Al-Rabwah, 19(1), 056–064. <https://doi.org/10.55799/jalr.v19i1.688>
- Nazifa, M. N., Asmuri, A., & Afandi, I. (2025). Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan), 6(1), 60–67. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.745>
- Rahardjo, M. D. (1993). Intelektual, inteligensia, dan perilaku politik bangsa: Risalah cendekiawan muslim. Mizan.
- Siswati, E. (2021). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 5(1), 167–186.
- Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren madrasah sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern. LP3ES.
- Sudrajat, A. (2021). Analisis filsafat Paulo Freire terhadap sistem pendidikan Indonesia. Jurnal Perspektif, 5(1), 14. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.107>
- Tilaar, H. A. R. (1994). Manajemen pendidikan nasional: Kajian pendidikan masa depan. Remaja Rosdakarya.
- Zulkifli, & Muhammad. (2023). Perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia (telaah kurikulum PAI pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka). Journal of Engineering Research, 10(1), 35–45. <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai>